

POLICY BRIEF

PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA DIDIK SMKN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NIDA HANDAYANI, S.IP., M.Si

DR. RAHMAT SALAM, M.Si

DR. MAYA PUSPITA DEWI, M.Si

EDI RAHMAN





DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (BPSDM KALTIM) GELAR PEMBUKAAN REPORT PENDIDIKAN MELALUI PLATFORM MERDEKA MENYALAKAN UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Sejalan dengan ini, James Midgley (dalam Adi, 2013) juga mengungkapkan bahwa kesejahteraan dapat tercipta apabila berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik.

Dalam bukunya, Sumardi (2016) mengatakan bahwa profesionalitas guru, baik pada jenjang dasar maupun menengah diidentifikasi masih kurang mampu mengelola praktik pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Kekurang profesionalan guru dapat dilihat paling tidak dari segi penguasaan materi ajar (kompetensi profesional); dan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta mengevaluasi hasil belajar peserta didik (kompetensi pedagogis)

Kalimantan Timur berdasarkan Hasil analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020 menunjukkan hampir seluruh anak usia 7-15 tahun di Kalimantan Timur telah dapat mengakses pendidikan dasar. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan menengah pada anak usia 16-18 tahun. Tidak terdapat perbedaan akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan di kedua jenjang pendidikan. Faktor latar belakang keluarga, yakni pendidikan kepala keluarga dan kondisi ekonomi, serta tempat tinggal anak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan akses menuju pendidikan menengah. Tingkat ketimpangan akses pendidikan menengah lebih rendah di wilayah perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Reformasi kebijakan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk menghilangkan keterkaitan antara akses pendidikan anak dengan keadaan di luar kontrol seorang anak, seperti latar belakang keluarga atau tempat tinggal. Kebijakan yang bisa diambil antara lain memperbanyak jumlah sekolah menengah, serta meningkatkan akses transportasi dan infrastruktur jalan untuk mempermudah akses pendidikan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kapasitas pendidikan lokal menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya menatar tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). "Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga akses pendidikan menjadi tantangan khusus. Disdikbud Kaltim telah melakukan peningkatan kompetensi bagi guru-guru di daerah 3T maupun di perkotaan dalam upaya menciptakan kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah.

Disdikbud Kaltim telah mengidentifikasi kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan yang mencapai lebih dari 5.000 orang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah setempat mengambil langkah-langkah konkret, termasuk peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pembinaan. Salah satu inisiatif yang diambil adalah mengadakan lomba sekolah terbaik, yang telah meningkatkan motivasi dan inovasi di sekolah-sekolah, terutama di daerah 3T juga memiliki potensi yang besar untuk berkembang,". pentingnya mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru, yang merupakan kunci untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Kurniawan, setidaknya ada sekitar 4.583 guru yang telah bersertifikat pendidik jenjang SMA/SMK/SLB baik PNS maupun Non-PNS di Tahun 2022.

"Total 4.583 ini dari jumlah keseluruhan guru yang ada di Kaltim sebanyak 9.613 guru. Dari data dapodik, untuk SMA negeri/swasta itu ada sekitar 4.544 guru, SMK negeri/swasta 4.689 guru. Begitu juga SLB Negeri/Swasta jumlahnya 380 guru. Totalnya kalau dijumlahkan disini sebesar 9.613 guru," bebernyanya.

Adapun rincian 4.583 guru yang telah memiliki sertifikasi baik tingkat SMA/SMK/SLB swasta dan negeri di Provinsi Kaltim antara lain 3.615 guru dengan kategori Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan 968 untuk guru kategori Non PNS.

Pertama guru PNSD Tingkat SMK Negeri (1498). Rinciannya, Samarinda (445), Balikpapan (317), Berau (79), Bontang (150), Kutai Barat (38), Kutai Kartanegara (156), Kutai Timur (76), Mahakam Ulu (0), Paser (113), PPU (124).

Kedua, untuk guru non PNS yang mengajar di sekolah Negeri. Tingkat SMK Negeri (242). Rinciannya, Samarinda (59), Balikpapan (34), Berau (21), Bontang (6), Kutai Barat (8), Kutai Kartanegara (45), Kutai Timur (45), Mahakam Ulu (0), Paser (19), PPU (5).



DATA SEKOLAH SMKN SE KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH SISWA
1	SMK NEGERI 1 ANGGANA	20	390
2	SMK NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT	30	533
3	SMK NEGERI 1 KOTA BANGUN	20	178
4	SMK NEGERI 1 LOA JANAN	21	95
5	SMK NEGERI 1 MARANGKAYU	25	317
6	SMK NEGERI 1 MUARA BADAK	22	339
7	SMK NEGERI 1 MUARA JAWA	24	254
8	SMK NEGERI 1 MUARA KAMAN	16	51
9	SMK NEGERI 1 MUARA MUNTAI	16	234
10	SMK NEGERI 1 SAMBOJA	33	644
11	SMK NEGERI 1 SANGASANGA	44	572
12	SMK NEGERI 1 SEBULU	22	372
13	SMK NEGERI 1 TENGGARONG	63	1108
14	SMK NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG	20	179
15	SMK NEGERI 2 SEBULU	23	373
16	SMK NEGERI 2 TENGGARONG	72	1170
17	SMK NEGERI 3 TENGGARONG	36	405

Selain masalah kualitas kompetensi guru yang telah disebutkan diatas, terdapat juga masalah lain terkait kewajiban guru dalam mengajar. Dengan gambaran sebagai berikut, Sejak tahun 2009, anggaran pendidikan telah mencapai 20% dari APBN. Setengah dari anggaran tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru, dengan pagu yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Maka dari itu, dilihat dari persentase yang disisihkan untuk guru dapat dikatakan bahwa kesejahteraan guru telah membaik. Bagi guru yang telah disertifikasi, besaran tunjangan profesional bisa mencapai satu kali gaji pokok. Apabila guru yang telah disertifikasi ditempatkan di daerah khusus dan mendapatkan tunjangan khusus, maka pendapatan mereka bisa mencapai tiga kali gaji pokok.

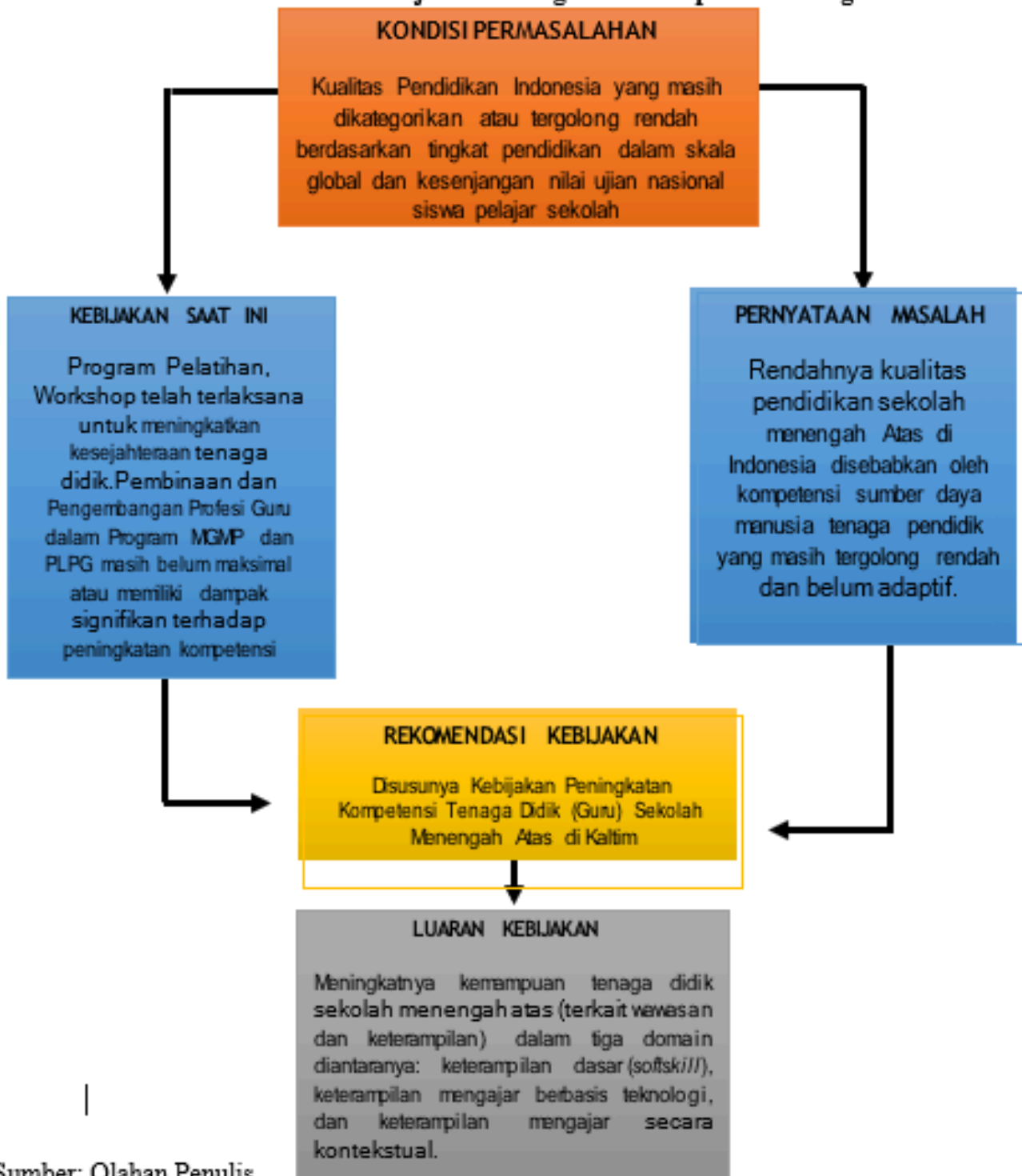
Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam policy brief meliputi jenis pendekatan, metode pengumpulan data, penetapan informan, dan analisis data yang digunakan. Metode juga bisa berupa kegiatan forum yang membahas tentang isu yang sedang diangkat

MODEL PEMIKIRAN





Berdasarkan latar belakang dan telaah masalah yang dilakukan, maka berikut merupakan model rekomendasi kebijakan yang menggambarkan logika pembentukan kebijakan yang akan diajukan

Skema 1. Model Kebijakan Peningkatan Kompetensi Tenaga Didik




Sumber: Olahan Penulis





REKOMENDASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA DIDIK SEKOLAH DI KALIMATAN TIMUR

Kebijakan ini merupakan suatu bentuk investasi atas sumber daya manusia tenaga didik, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia output dari pendidikan, yakni putra dan putri peserta didik. Adapun kebijakan ini diajukan untuk menjadi pijakan utama yang menyempurnakan kebijakan dan program pembinaan dan pengembangan profesi guru, yang dinilai belum berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kompetensi tenaga didik. Terlebih, peningkatan kompetensi ini menjadi sangat penting dikarenakan Kurikulum 2013 dan dilanjutkan kurikulum merdeka yang telah terbentuk secara komprehensif berorientasi pada student-centered learning. Oleh karena itu, kompetensi dan kapasitas tenaga didik perlu ditingkatkan agar mampu memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar siswa.

Berikut merupakan aspek yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi tenaga didik diantaranya:

1. Keterampilan dasar (softskill) tenaga didik yang meliputi kemampuan komunikasi inter-personal dan antar-personal, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan mengaplikasikan literasi dasar (membaca, menulis dan berdiskusi), serta kemampuan manajerial kasus baik dalam merespon peserta didik ataupun dalam orang tua peserta didik;
 2. Keterampilan mengajar berbasis teknologi yang meliputi kemampuan mengoperasikan teknologi komputer dengan aplikasi dasar microsoft office dan kemampuan mengumpulkan bahan belajar mengajar yang bersumber dari internet menggunakan teknologi komputer;
- 




REKOMENDASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA DIDIK SEKOLAH DI KALIMATAN TIMUR

3. Keterampilan mengajar yang bersifat kontekstual yang meliputi pemahaman mengenai aspek perkembangan peserta didik yang dikategorikan anak secara biologis, psikologis, dan sosial- spiritual, kemampuan mengajar yang menyesuaikan dinamika dan kondisi pembelajaran, serta kemampuan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada siswa.

Ketiga aspek kompetensi tenaga didik tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan seminar dan pelatihan secara terprogram, yang terdiri atas kurikulum penyelenggaraan pelatihan dan periode waktu pelatihan tertentu. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi ini dapat disesuaikan dengan konteks mata pelajaran tenaga didik, yang dapat diselenggarakan bersama dengan program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

ADAPUN KEBIJAKAN INI MEMILIKI TUJUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Dalam jangka pendek, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penyelenggaraan peningkatan wawasan dan keterampilan tenaga didik atas ketiga aspek kompetensi melalui kegiatan seminar dan pelatihan yang terprogram;
 2. Dalam jangka menengah, implementasi dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan belajar mengajar di era digital;
 3. Dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan atas peningkatan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia tenaga pendidik.
- 



DAFTAR PUSTAKA

Sumardi. 2016. *Pengembangan Profesionalisme Guru Berbasis MGMP : Model, dan Implementasinya*. Solo.: Universitas Sebelas Maret

Kemendikbud. 2016. *Indonesia Educational Statistics in Brief 2015/2016*. Jakarta:

Mukhid, Abd. 2007. *Tadris: Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui Sistem Pembelajaran yang Tepat, Volume 2, Nomor 1*.

Sumardi. 2016. *Pengembangan Profesionalisme Guru Berbasis MGMP : Model, dan Implementasinya*. Solo.: Universitas Sebelas Maret.

Website

<https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/1/160000> Pusat Penilaian Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Guru Daerah Terpencil Kerap Mangkir : <http://print.kompas.com/baca/2015/08/26/Guru-Daerah-Terpencil-Kerap-Mangkir>.

